



NUSANTARA

SIARAN PERS

SIARAN PERS

Otorita Ibu Kota Nusantara

05 September 2023

Tangani Penambangan Liar, OIKN dan Aparat Penegak Hukum Bentuk Satgas

BALIKPAPAN – Pembangunan IKN dilandaskan pada prinsip rendah emisi karbon dimana IKN berkomitmen menjadi kota netral karbon pada tahun 2045. Selaras dengan pembangunan kota hutan, perlu dilakukan penertiban pada kegiatan penambangan ilegal di wilayah IKN. Guna melakukan percepatan pengendalian penambangan ilegal ini Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk pencegahan dan penanggulangan penambangan ilegal di wilayah IKN. Satgas terdiri dari unsur Polda Kalimantan Timur, Kodam VI Mulawarman, Lanal TNI Angkatan Laut Balikpapan, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim berikut UPTD Taman Hutan Raya Bukit Suharto, Dinas ESDM Kaltim dan Otorita IKN.

Pada Selasa (5/9/2023) lalu, Satgas telah melaksanakan rapat koordinasi perdana yang antara lain membahas rencana kerja, baik yang meliputi pencegahan hingga penindakan. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna A. Safitri, saat membuka rapat dimaksud mengatakan, “Pembangunan IKN perlu cara pandang baru untuk melakukan koreksi terhadap tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam. Satgas ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan penambangan ilegal di wilayah IKN.”

Komitmen mendukung agenda kerja Satgas disampaikan dengan tegas oleh perwakilan instansi dan aparat penegak hukum yang hadir dalam rapat tersebut. “Kami senang dan mendukung Satgas ini. Ini sudah lama kami tunggu-tunggu karena banyaknya penambangan ilegal di wilayah kerja kami,” ujar Polisi Kehutanan Eko Wibowo mewakili Kepala UPTD Tahura Bukit Suharto. Sebagai informasi, Tahura ini adalah kawasan konservasi yang seluruhnya masuk dalam wilayah IKN.

Pembentukan Satgas didasarkan pada kesepakatan instansi dan penegak hukum pada rapat koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan pada 26 Mei 2023.

Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana OIKN Onesimus Patiung, menambahkan bahwa hal lain yang perlu pemikiran bersama adalah pemulihan lingkungan yang harus dilakukan akibat kegiatan penambangan ilegal ini. Paralel dengan upaya penertiban tambang ilegal, OIKN dengan dukungan perguruan tinggi sedang menyiapkan panduan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang.

Tim Komunikasi Otorita Ibu Kota Nusantara

Narahubung: Sekretariat OIKN

(+62) 811-8115-8888

Website : ikn.go.id

Instagram : [instagram.com/ikn_id](https://www.instagram.com/ikn_id)



NUSANTARA

SIARAN PERS

Facebook : facebook.com/iknindonesia1
Twitter : twitter.com/ikn_id
Youtube : IKN Indonesia

#KotaDuniauntukSemua
#Nusantara
#IbuKotaNegara

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. OIKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. OIKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

DOKUMENTASI FOTO
Sumber: Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
Otorita Ibu Kota Nusantara



Pemberian Materi oleh Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Kedepuitan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Onesimus Patiung.





Arahan Deputy Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Myrna Asnawati Safitri.



Tanggapan dari Dandim 0913 Penajam Paser Utara, Arfan Affandi..



Tanggapan dari Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, I Ketut Kasna Dedi.